



BELAJAR DARI NEGERI EVEREST: SISTEM PENDIDIKAN DASAR DALAM PERUBAHAN SOSIAL NEPAL, 1950-2000

Muhammad Rizky Agli^a, Des Fitra Dwi Wibowo^b, Aslama Nanda Rizal^{*c}

aslamanandarizal@lecturer.undip.ac.id(*)

^aUniversitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang, Indonesia.

^bUniversitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang, Indonesia.

^c Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang, Indonesia.

Article history:

Received 19 December 2024; Revised 30 April 2025; Accepted 5 June 2025; Published 30 June 2025

Abstract: *Primary education in Nepal plays a key role in social change, linking modernization efforts with the challenges of social, geographic and cultural inequality. As a cornerstone of human development, primary education in Nepal evolved from an exclusive system under the Rana Dynasty—which restricted access to the elite—to an inclusive system after the 1951 revolution. Using the literature study method and qualitative methods to analyze sources, this research examines the transformation of the primary education system and its impact on society through the analysis of various secondary sources, including educational reports, international journals. The results show that reforms in the 1970s, through the New Education System Plan (NESP), succeeded in expanding access to education by centralizing the curriculum, although rural areas remained behind. In the 1990s, efforts to create free and inclusive education further increased enrollment, including from women and marginalized communities. However, challenges such as cultural biases that marginalize minority groups, lack of infrastructure in remote areas, and dependence on foreign donors continue to limit the effectiveness of the education system. On the other hand, basic education has improved social mobility, empowered women and strengthened national identity amid ethnic and linguistic diversity.*

Keywords: *primary education; social change; Nepal*

Abstrak: Pendidikan dasar di Nepal memainkan peran kunci dalam perubahan sosial, menghubungkan upaya modernisasi dengan tantangan ketimpangan sosial, geografis, dan budaya. Sebagai landasan pembangunan manusia, pendidikan dasar di Nepal berkembang dari sistem yang eksklusif di era Dinasti Rana—yang membatasi akses hanya bagi elit—menuju sistem inklusif pasca-revolusi 1951. Dengan menggunakan metode studi literatur dan metode kualitatif untuk menganalisis sumber, penelitian ini menelaah transformasi sistem pendidikan dasar dan dampaknya terhadap masyarakat melalui analisis berbagai sumber sekunder, termasuk laporan pendidikan, jurnal internasional. Hasil kajian

menunjukkan bahwa reformasi pada 1970-an, melalui New Education System Plan (NESP), berhasil memperluas akses pendidikan dengan sentralisasi kurikulum, meskipun wilayah pedesaan tetap tertinggal. Pada 1990-an, upaya untuk menciptakan pendidikan gratis dan inklusif semakin meningkatkan angka partisipasi, termasuk dari kelompok perempuan dan masyarakat marginal. Namun, tantangan seperti bias budaya yang meminggirkan kelompok minoritas, kurangnya infrastruktur di wilayah terpencil, dan ketergantungan pada donor asing terus membatasi efektivitas sistem pendidikan. Di sisi lain, pendidikan dasar berhasil meningkatkan mobilitas sosial, memberdayakan perempuan, dan memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman etnis dan bahasa.

Kata kunci: pendidikan dasar; perubahan sosial; Nepal

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan dalam masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama kemajuan, pendidikan berfungsi untuk menyalurkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks sosial, pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu tetapi juga berimbas terhadap pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi budaya (Mathema, 2007). Secara historis, pendidikan telah menjadi alat penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Dengan menyediakan akses ke pengetahuan dan keterampilan, pendidikan membuka peluang bagi mobilitas sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung, peran pendidikan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan ekonomi dan sosial (Altan, 2020). Pendidikan juga punya esensi sebagai praktik pembebasan, menekankan pentingnya kesadaran kritis sebagai alat emansipasi budaya (Rizal, 2023).

Namun, meskipun memiliki potensi besar, sistem pendidikan di banyak negara masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidaksetaraan akses, kualitas pendidikan yang bervariasi, dan kurikulum yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan lokal adalah beberapa isu yang sering muncul. Tantangan-tantangan ini menghambat kemampuan pendidikan untuk berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang efektif (Caddell, 2007).

Pendidikan dasar, sebagai salah satu elemen kunci dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi sebuah negara, khususnya di negara berkembang seperti Nepal. Dalam rentang waktu 1950 hingga 2000, Nepal mengalami berbagai transformasi sosial dan politik yang dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Peran pendidikan dasar dalam perubahan ini seringkali diasosiasikan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan mobilitas sosial, serta memperkuat institusi-institusi negara (Caddell, 2007).

Di Nepal, pendidikan dasar juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sistem pendidikan ini berfungsi sebagai fondasi dalam membangun modal manusia, yang diperlukan untuk menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Dalam konteks Nepal, di mana tingkat literasi dan akses terhadap pendidikan masih rendah hingga pertengahan abad ke-20, peran pendidikan dasar menjadi semakin relevan untuk mendorong perubahan sosial (Sharma, 1990).

Sebelum 1951, sistem pendidikan di Nepal terbatas pada lingkungan elit istana dan agama. Mayoritas penduduk tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Ketika sistem monarki absolut berakhir pada 1951, Nepal mengalami transisi politik yang membuka peluang untuk reformasi pendidikan. Periode ini menjadi tonggak sejarah dimulainya pendidikan dasar yang inklusif, meskipun infrastruktur yang tersedia masih sangat minim. Laporan Hugh B. Wood (1965) tentang perkembangan pendidikan di Nepal menunjukkan bahwa pendidikan sebelum 1950-an didominasi oleh sekolah berbasis agama, seperti sekolah Budha (Gompas) dan sekolah berbahasa Sansekerta, yang hanya ditujukan untuk kelompok tertentu.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana sistem pendidikan dasar di Nepal berperan dalam mendorong perubahan sosial selama periode 1950-2000. Meskipun pendidikan dasar diakui sebagai kunci pembangunan sosial, implementasinya di Nepal menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, ketimpangan gender, serta keterbatasan infrastruktur dan tenaga pengajar. Ketergantungan pada bantuan internasional untuk pendanaan juga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program pendidikan ini dalam jangka panjang. Setelah reformasi pendidikan dimulai pada 1951, pendidikan dasar menjadi alat penting untuk mengatasi ketimpangan sosial dan budaya yang melekat dalam masyarakat Nepal yang multietnis. Namun, efektivitas sistem ini dalam memperbaiki literasi, mendorong mobilitas sosial, dan meningkatkan kesetaraan gender masih belum sepenuhnya jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pendidikan dasar berkontribusi pada perubahan sosial di Nepal.

METODE

Riset ini menggunakan metode penelitian sejarah dan studi literatur. Metode penelitian studi literatur (Darmalaksana, 2020) menggunakan sumber-sumber tertulis yang relevan baik berupa buku yang telah digitalisasi maupun artikel jurnal internasional serta beberapa artikel jurnal berbahasa Indonesia yang membahas mengenai sejarah Nepal, sejarah sosial di Nepal, serta mengenai pendidikan dasar yang ada di Nepal dari periode 1950-2000. Kemudian menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan dan memilah informasi terkait dan menginterpretasi informasi yang didapatkan ke dalam penulisan artikel penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pendidikan Dasar Nepal

Sistem pendidikan dasar di Nepal mengalami transformasi signifikan sepanjang periode 1950 hingga 2000, seiring dengan perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Sebelum 1950, Nepal berada dalam kondisi isolasi politik, sosial, dan budaya yang mendalam, yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan sektor pendidikan. Selama lebih dari satu abad, Nepal di bawah pemerintahan Dinasti Rana (1846–1951) menerapkan kebijakan isolasi yang ketat. Pemerintahan Rana memprioritaskan kontrol absolut atas rakyat dan akses terhadap pendidikan sangat dibatasi untuk menjaga status quo elit politik. Sistem ini menyebabkan tingkat literasi nasional hanya sekitar 2%, dengan mayoritas penduduk, terutama di pedesaan, buta huruf. Pendidikan pada masa ini tidak hanya terbatas dalam akses tetapi juga tidak terstruktur, tanpa sistem formal yang dapat mendukung perkembangan masyarakat secara luas (Gurung, 2012).

Masyarakat pedesaan, yang membentuk mayoritas populasi, tidak memiliki akses sama sekali terhadap pendidikan formal. Sebaliknya, mereka mengandalkan tradisi pendidikan informal, seperti pengajaran agama di kuil, masjid, atau Gompa di wilayah Himalaya, yang lebih berfokus pada nilai-nilai spiritual daripada keterampilan praktis. Geografi Nepal yang sulit, ditambah dengan isolasi yang disengaja oleh pemerintah, memperparah keterbatasan akses pendidikan. Wilayah pegunungan yang terjal dan minimnya infrastruktur transportasi membuat pendirian sekolah di daerah terpencil hampir mustahil. Akibatnya, kesenjangan pendidikan antara masyarakat di Lembah Kathmandu yang lebih maju dan masyarakat pedesaan di wilayah pegunungan semakin melebar (Pradhan, 2018). Hal ini juga memperlihatkan ketertinggalan Nepal dengan negara tetangganya seperti India dan Tiongkok.

Sebelum 1951, Nepal berada di bawah rezim keluarga Rana yang otoriter, yang membatasi pendidikan hanya untuk elit penguasa. Sekolah modern pertama, Durbar High School, didirikan pada 1853 oleh Jang Bahadur Rana setelah kunjungannya ke Inggris, tetapi hanya untuk anak-anak keluarga Rana dan kerabat bangsawannya saja. Dengan total populasi yang sebagian besar buta huruf, tingkat literasi pada 1951 hanya sekitar 5%, dengan tingkat literasi perempuan hampir nihil. Pendidikan pada masa itu menjadi alat stratifikasi sosial, mempertahankan hierarki kasta dan ekonomi. Sistem ini berubah drastis setelah revolusi politik 1951 yang menggulingkan rezim Rana dan memperkenalkan demokrasi. Revolusi ini membuka akses pendidikan untuk masyarakat umum, meskipun tantangan seperti kurangnya infrastruktur dan tenaga pengajar tetap menjadi penghalang utama. (Gurung, 2012).

Gerakan untuk menggulingkan rezim Rana mulai menguat setelah Perang Dunia II, ketika pengaruh ide-ide demokrasi dan nasionalisme dari India dan dunia internasional mulai memasuki

Nepal. Tokoh kunci dalam revolusi ini adalah Raja Tribhuvan Bir Bikram Shah, yang memainkan peran penting sebagai simbol perlawanan. Pada 1950, Raja Tribhuvan melarikan diri ke India untuk mencari dukungan internasional dan memperkuat hubungan dengan para aktivis demokrasi Nepal yang berbasis di sana. Bishweshwar Prasad Koirala (B.P. Koirala), seorang pemimpin politik Nepal yang terinspirasi oleh perjuangan kemerdekaan India, membentuk Partai Kongres Nepal (Nepali Congress) yang menjadi kekuatan utama dalam revolusi. Partai ini bekerja sama dengan pemerintah India untuk melancarkan gerakan rakyat melawan Dinasti Rana (Wood, 1956).

Revolusi mencapai puncaknya pada awal 1951 ketika kombinasi tekanan diplomatik India, pemberontakan rakyat di Nepal, dan dukungan internasional memaksa keluarga Rana untuk menyerahkan kekuasaan. Perdana Menteri terakhir dari Dinasti Rana, Mohan Shumsher Jang Bahadur Rana, setuju untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Kongres Nepal. Revolusi ini tidak hanya mengakhiri kekuasaan Rana tetapi juga membuka jalan bagi Raja Tribhuvan untuk memulai reformasi demokrasi dan sosial, termasuk pendidikan (Wood, 1956).

Pada 1954, pembentukan Komisi Perencanaan Pendidikan Nasional, komisi ini dipimpin oleh Sardar Rudra Raj Pandey dan dengan bantuan dari konsultan internasional seperti Dr. Hugh B. Wood, menandai upaya serius pertama untuk merancang sistem pendidikan yang inklusif. Komisi ini merekomendasikan target ambisius, yakni literasi universal dalam 25 tahun. Langkah ini diwujudkan melalui Rencana Lima Tahun pertama (1956–1961), yang berfokus pada perluasan pendidikan dasar. Selama periode ini, jumlah sekolah dasar meningkat menjadi lebih dari 1.200, dengan 1.800 guru dilatih untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mencapai hasil yang merata. Akses pendidikan tetap terpusat di daerah perkotaan, sementara wilayah pedesaan yang sulit dijangkau seringkali terabaikan. Selain itu, kurangnya fasilitas sekolah, seperti gedung permanen, membatasi efektivitas kebijakan ini. Pada akhir periode ini, tingkat pendaftaran sekolah dasar hanya mencapai sekitar 15,3%, dengan tingkat partisipasi anak perempuan jauh lebih rendah dibandingkan anak laki-laki (Bhandari, 2023).

Perubahan besar terjadi pada 1971 dengan peluncuran New Education System Plan (NESP) atas inisiatif Raja Mahendra Bir Bikram Shah Dev. Kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Lima Tahun Keempat (1970–1975). NESP bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih seragam melalui sentralisasi pengelolaan sekolah dan penerapan kurikulum nasional. Selama periode ini, pemerintah mengambil alih sekolah-sekolah yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat, dengan harapan meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan (Gurung, 2012). Pendidikan dasar digratiskan hingga kelas tiga, dan jumlah sekolah dasar meningkat menjadi lebih dari 2.200. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kurangnya guru terlatih, yang pada awal 1980-an mencapai 60% dari total guru sekolah dasar. Selain itu, situasi politik yang tidak stabil akibat sistem Panchayat tanpa partai mengarah pada politisasi pendidikan, dengan guru sering kali digunakan sebagai alat untuk propaganda politik. Meski demikian, program literasi dewasa mulai diperkenalkan untuk mengurangi tingkat buta huruf yang tinggi (Bhandari, 2023).

Pada 1990-an, setelah kembalinya demokrasi multipartai, kebijakan pendidikan Nepal kembali mengalami transformasi. Reformasi ini dipengaruhi oleh Deklarasi Jomtien 1990 tentang Education for All, yang menekankan bahwa pendidikan adalah hak universal. Pemerintah Nepal memperkenalkan pendidikan gratis hingga kelas delapan dan menandatangani Konvensi Hak Anak (CRC), yang memperkuat komitmen terhadap pendidikan inklusif. Komisi Pendidikan Nasional yang dibentuk pada 1992 memberikan rekomendasi untuk mendukung pendidikan berbasis nilai-nilai demokrasi, dengan fokus pada pemerataan akses bagi kelompok masyarakat terpinggirkan. Meskipun demikian, sektor pendidikan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pendanaan dan ketergantungan pada sekolah swasta, yang mulai berkembang pesat sebagai alternatif bagi masyarakat kelas menengah dan atas. Pada akhir 1990-an, rasio pendaftaran sekolah dasar meningkat secara signifikan, mencapai lebih dari 107% di beberapa wilayah, meskipun kualitas pendidikan masih menjadi isu yang perlu diperbaiki (Wood, 1956).

Sepanjang 1990-an, pendidikan dasar di Nepal mulai menunjukkan hasil yang signifikan dalam memperbaiki tingkat literasi nasional. Angka literasi dewasa meningkat dari kurang dari 30% pada awal 1950-an menjadi lebih dari 60% pada 2000. Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, kesenjangan dalam kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, atau toilet yang memadai, yang semuanya berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah (Bhatta, 2007).

Data tahun 2000 menunjukkan adanya peningkatan dalam angka partisipasi pendidikan dasar, dengan jumlah sekolah dasar mencapai lebih dari 17.000 dan jumlah guru sekolah dasar lebih dari 71.000. Proporsi anak perempuan dalam pendaftaran sekolah dasar meningkat menjadi sekitar 36%, meskipun kesenjangan gender tetap menjadi tantangan signifikan. Berbagai proyek inovatif, seperti Primary Education Project (PEP) dan Seti Project, diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang terpinggirkan. Namun, tantangan lain, seperti tingkat putus sekolah yang tinggi di daerah terpencil, tetap menjadi hambatan bagi universalitas pendidikan dasar (All Nepal Education Committee, 1961).

Secara keseluruhan, transformasi pendidikan dasar di Nepal dari 1950 hingga 2000 mencerminkan perjalanan panjang dari eksklusivitas menuju inklusivitas. Meski kemajuan signifikan telah dicapai dalam hal akses dan jumlah sekolah, banyak tantangan struktural seperti politisasi pendidikan, kekurangan sumber daya, dan kesenjangan sosial-ekonomi terus menghambat upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar adil dan berkualitas bagi seluruh rakyat Nepal (Gurung, 2012). Namun, tantangan utama yang terus dihadapi Nepal adalah ketergantungan pada bantuan asing untuk pendanaan pendidikan. Sebagian besar program pendidikan, termasuk pembangunan sekolah dan pelatihan guru, didanai oleh lembaga donor internasional.

Ketergantungan tersebut menimbulkan risiko keberlanjutan, terutama ketika prioritas donor bergeser atau pendanaan berkurang. Selain itu, kurikulum pendidikan dasar sering kali dianggap tidak relevan dengan kebutuhan lokal, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara pendidikan dan

lapangan kerja (Gurung, 2012). Walaupun penerapan perubahan kurikulum dalam pendidikan di Nepal telah diubah sejak 1971 melalui National Education System Plan yang dilakukan oleh pemerintah dan partisipasi guru, namun masih dianggap kurang dalam penerapannya (Tripathe, 2002).

Dampak Pendidikan Dasar terhadap Perubahan Sosial di Nepal

Pendidikan menjadi strategi penting untuk membangun identitas nasional Nepal setelah Dinasti Rana runtuh pada 1951. Menciptakan kesatuan dalam keragaman adalah tantangan utama bagi pemerintah di negara dengan keragaman etnis, bahasa, dan geografis. Pendidikan dasar mulai mendorong cerita kebangsaan melalui kurikulum dan buku teks yang menekankan unsur-unsur seperti rasa hormat terhadap monarki dan agama Hindu sebagai simbol persatuan (Shah, 2020). Sebagai contoh, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masa itu menggunakan tokoh sejarah seperti Raja Prithvi Narayan Shah untuk mendorong siswa untuk bersatu. Buku teks ini tidak hanya menekankan sejarah negara tetapi juga mengarahkan siswa ke proyek pembangunan negara. Ini menciptakan hubungan antara pendidikan dan pembangunan negara.

Namun, hal ini juga mencerminkan bias budaya yang mengistimewakan kasta tinggi Hindu. Sekolah menggunakan bahasa Nepal sebagai bahasa pengantar, mengabaikan bahasa ibu dari kelompok etnis minoritas. Salah satu tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghasilkan identitas nasional yang sama, tetapi juga untuk memperparah marginalisasi kelompok tertentu. Meskipun bertujuan untuk integrasi, kebijakan ini sering dikritik karena tidak menghargai keberagaman dan hanya mengutamakan budaya yang dominan. Dalam waktu yang lama, rasa nasionalisme yang homogen ini telah menyebabkan konflik sosial, terutama di kalangan kelompok yang merasa terpinggirkan (Sharma, 1990).

Setelah 1951, reformasi pendidikan Nepal berakar pada gagasan bahwa pendidikan dasar sangat penting untuk modernisasi sosial dan ekonomi. Pemerintah Nepal meluncurkan kebijakan yang memprioritaskan pendidikan dasar universal dengan dukungan internasional seperti UNESCO dan USAID. Misalnya, Komisi Pendidikan Nasional tahun 1955 menekankan bahwa pemberantasan buta huruf adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi dan demokrasi yang baik. Selanjutnya, program seperti *Basic and Primary Education Program* (BPEP) digunakan untuk memperluas akses pendidikan ke daerah pedesaan (Shah, 2020).

Dampaknya mulai terlihat ketika partisipasi siswa di sekolah dasar meningkat dari 40% pada 1960-an menjadi sekitar 80% pada akhir 1990-an. Pendidikan juga memberi masyarakat peluang untuk meninggalkan gaya hidup agraris tradisional dan mengenal dunia luar. Namun, kualitas pendidikan tetap menjadi masalah yang signifikan. Banyak sekolah tidak memiliki guru yang cukup, dan kurikulum seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Walau bagaimanapun, modernisasi sosial yang didorong oleh pendidikan menghasilkan banyak perubahan, seperti peningkatan kesadaran akan hak-hak individu dan generasi muda yang lebih sadar politik dan kritis (Wood, 1956).

Salah satu dampak paling signifikan dari pendidikan dasar di Nepal adalah pemberdayaan kelompok marginal, terutama perempuan dan kelompok etnis minoritas. Sebelum reformasi pendidikan, perempuan hampir sepenuhnya dikecualikan dari pendidikan formal, dan sistem kasta yang kaku membatasi mobilitas sosial. Dengan diperkenalkannya pendidikan dasar universal, lebih banyak anak perempuan mulai bersekolah. Pada awal 1990-an, angka partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar meningkat menjadi hampir 50%, meskipun kesenjangan tetap ada, terutama di daerah pedesaan (Sharma, 1990).

Kelompok etnis minoritas juga mulai memanfaatkan pendidikan sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dan hak politik. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pengajaran dalam bahasa ibu. Meskipun pemerintah mengakui pentingnya pendidikan multibahasa, implementasinya masih terbatas. Dalam beberapa kasus, sekolah menjadi ruang perjuangan politik bagi kelompok etnis yang menginginkan perubahan sosial yang lebih besar. Perjuangan ini menyoroti peran pendidikan sebagai alat untuk mengatasi ketidaksetaraan dan sebagai sarana advokasi untuk perubahan sosial yang lebih inklusif (Pandey dan Wood, 1956). Pendidikan dasar membantu memperkuat posisi kelompok minoritas etnis, seperti Newar, Tamang, dan Tharu, yang sebelumnya terpinggirkan. Mereka kini dapat menggunakan pendidikan sebagai alat untuk melawan diskriminasi sosial dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kurikulum sekolah yang multibahasa di beberapa wilayah memungkinkan anak-anak belajar dalam bahasa ibu mereka, yang mendukung pelestarian budaya lokal sambil mempersiapkan mereka untuk integrasi yang lebih luas dalam masyarakat Nepal (Caddel, 2007).

Ekonomi Nepal telah berkembang secara signifikan berkat pendidikan dasar, terutama dengan mengurangi ketergantungan negara pada pertanian konvensional. Anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan dasar mulai memperoleh pendidikan yang memungkinkan mereka bekerja di sektor formal (Basyal, 2020). Misalnya, kemampuan membaca dan menulis memungkinkan pekerjaan di perdagangan kecil atau administrasi pemerintahan. Hal ini sangat terlihat di kota-kota, di mana peningkatan literasi dikaitkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi non-agraris.

Namun, di daerah pedesaan, tantangan masih besar. Banyak anak putus sekolah karena tekanan ekonomi keluarga untuk membantu di ladang atau pekerjaan rumah tangga. Meskipun pendidikan berupaya menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, keterbatasan infrastruktur dan kualitas pengajaran sering kali membuat lulusannya tidak sepenuhnya siap menghadapi kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu, pendidikan dasar di Nepal sering kali tidak diiringi dengan pelatihan keterampilan kejuruan yang relevan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut agar pendidikan benar-benar mendukung transformasi ekonomi di seluruh lapisan masyarakat (Mathema, 2007).

Di Nepal, pendidikan memiliki pengaruh politik yang signifikan karena menjadi tempat konflik sosial dan penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, selama gerakan Maois, sekolah

menjadi simbol ketidakadilan sosial dan ekonomi. Persatuan Mahasiswa Independen Nepal (ANISU), yang berafiliasi dengan Maois, memimpin pemogokan besar-besaran pada 2002 yang mengakibatkan penutupan sekolah di seluruh negeri (Gurung, 2012). Mereka menuntut penghapusan kurikulum yang dianggap menyimpang terhadap budaya tertentu dan akses pendidikan gratis. Sebaliknya, pemerintah juga menggunakan pendidikan untuk propaganda. Kurikulum dirancang untuk mendorong nasionalisme dan pengabdian kepada monarki selama era Panchayat (1960–1990). Perlawanan terhadap sistem pendidikan ini menunjukkan konflik antara berbagai kelompok sosial dan politik Nepal, menunjukkan bahwa pendidikan adalah tempat pertempuran ideologis dan alat pembangunan juga (Caddel, 2007).

Pendidikan dasar juga terbukti memainkan peran penting dalam mempercepat perubahan sosial di pedesaan Nepal. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan dasar cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam masyarakat. Pendidikan dasar tidak hanya meningkatkan mobilitas sosial tetapi juga mendorong perbaikan dalam kesehatan masyarakat, dengan anak-anak yang terdidik lebih cenderung memahami pentingnya kebersihan dan gizi (Bhatta, 2007).

Setelah 1950, pendidikan dasar menjadi alat penting untuk mendorong integrasi sosial dalam masyarakat Nepal yang multietnis dan multibahasa. Dengan lebih dari 100 etnis dan bahasa yang digunakan, pendidikan dasar memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai kelompok sosial melalui bahasa pengantar yang seragam dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional (Bhandari, 2023). Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa pendidikan ini dapat menjangkau masyarakat di daerah pedesaan yang terisolasi oleh kondisi geografis yang sulit. Ketimpangan geografis ini menciptakan jurang besar dalam akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pendidikan dasar di Nepal antara 1970–2000 memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial, meskipun tantangan besar masih dihadapi. Tingkat pendaftaran mencapai 94%, namun rendahnya efisiensi internal, tingginya angka putus sekolah, dan kualitas pembelajaran yang belum memadai menjadi hambatan utama. Upaya pemerintah melalui kebijakan Education for All dan desentralisasi manajemen sekolah berhasil meningkatkan akses bagi kelompok marjinal seperti Dalit, Janajati, dan perempuan. Faktor ekonomi, geografis, serta norma budaya turut memperburuk ketimpangan pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Melalui partisipasi aktif komunitas dalam pengelolaan sekolah, termasuk *School Management Committees* dan audit sosial, langkah-langkah perbaikan mulai terlihat (Lohani, 2010). Peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan tetap memerlukan komitmen penuh dari pemerintah dan dukungan masyarakat lokal.

SIMPULAN

Pendidikan menjadi tonggak utama dalam tumbuh dan berkembangnya suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Di Nepal, pendidikan melalui

berbagai dinamika dalam perkembangannya, khususnya pendidikan dasar. Pendidikan di Nepal awalnya hanya mengajari persoalan agama dan budaya masyarakat setempat. Perubahan pendidikan dasar di Nepal dari 1950 hingga 2000 menunjukkan evolusi signifikan dari sistem eksklusif menuju inklusivitas. Pada masa Dinasti Rana (1846–1951), pendidikan hanya tersedia bagi elit, dengan tingkat literasi nasional sekitar 2% dan perempuan hampir sepenuhnya buta huruf.

Revolusi politik 1951 membawa perubahan besar dengan pembukaan akses pendidikan bagi masyarakat umum, meskipun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan guru tetap menghambat kemajuan. Periode 1970-an memperkenalkan New Education System Plan (NESP) yang menciptakan sistem pendidikan terpusat dan memperluas akses di perkotaan, namun daerah terpencil masih tertinggal. Pada 1990-an, kebijakan pendidikan gratis hingga kelas delapan dan fokus pada pendidikan inklusif mulai mengurangi kesenjangan gender dan sosial, dengan angka partisipasi dasar meningkat tajam.

Pendidikan dasar di Nepal pasca-1951 menjadi sarana penting dalam membangun identitas nasional, menyatukan keragaman etnis, bahasa, dan geografis, meskipun sering bias terhadap budaya dominan. Kurikulum menekankan rasa hormat terhadap monarki dan agama Hindu untuk memupuk nasionalisme, tetapi mengabaikan bahasa ibu kelompok minoritas, yang memunculkan kritik atas marginalisasi budaya.

Reformasi pendidikan membuka akses lebih luas, meningkatkan partisipasi dari 40% (1960-an) hingga 80% pada akhir 1990-an, termasuk peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan dan kelompok marginal. Namun, ketimpangan geografis, kurikulum yang kurang relevan, dan tekanan ekonomi keluarga tetap menjadi tantangan. Selain itu, pendidikan berperan dalam perubahan sosial dengan mendorong kesadaran akan hak-hak individu, pemberdayaan etnis minoritas, dan penguatan ekonomi non-agraris, tetapi juga menjadi ruang konflik ideologis dalam dinamika politik Nepal.

DAFTAR RUJUKAN

- All Nepal Education Committee. (1961). *Report (text in Nepali)*. HMG/Nepal, Department of Education.
- Altan, M. Z. (2020). Education as a Social System in the Face of Future Challenges. *Education Reform Journal*, 5(1), 1-7.
- Basyal, Krishna Prasad. (2020). Legal Education In Nepal. *NUJS Journal Of Regulatory Studies*, 5(2)
- Bhandari. M.B. (2023). *Revisiting the Historical Development of Educational System in Nepal*. pp. 1-41.
- Bhatta, Pramod. (2007). *Providing Education for All: Foreign Aid and the Development of Primary Education in Nepal*.
- Bhatta, Pramod. *60 Years of Educational Development in Nepal*. Education in Nepal.

- Caddell, Martha (2007). *Education and Change: A Historical Perspective on Schooling, Development and the Nepali Nation-State*. In: Kumar, Krishna and Oesterheld, Joachim eds. *Education and Social Change in South Asia*. Orient Longman
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Gurung, Indra. (2012). A Review of Nepalese Public Education Policy: A History of Implementation and Achievements. *Education Policy and Equal Education Opportunities*. pp. 109-133.
- Lohani, Shiva. et al. (2010). *Universal Primary Education in Nepal: Fulfilling the Right for Education*. Prospects.
- Mathema, Kedar Bhakta. (2007). Crisis in Education and Future Challenges for Nepal. *European Bulletin of Himalayan Research*. 31. 46-66
- Pandey S.R.R, Bahadur K, Wood H.B. (1956). *Education In Nepal: Report Of The Nepal National Education Planning Commission*. Sanjivan Press and Associates
- Pradhan, Uma. (2018). The National Education in Nepal: Between the 'Local' and the 'Global'. *Education in South Asia and the Indian Ocean Islands*. 10(9). pp.165-182.
- Rizal, A.N. (2023). *Bung Karno sebagai Kepala Sekolah: Pemikiran dan Kebijakan Pendidikan Nasional Era Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*. Penerbit Elba.
- Shah, Rajendra Kumar. (2020). Pedagogical Reform at Primary Schools in Nepal: Examining the Child Centred Teaching. *Shanlax International Journal of Education*, 8(4) pp. 57-75. <https://doi.org/10.34293/education.v8i4.3355>
- Sharma , G. N. (1990). The Impact of Education During the Rana Period in Nepal, Himalaya. *The Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies*, 10(2)
- Tripathee. B.R. (2003). *Curriculum Development Process and Teacher's Participation In Nepal*. Shiksha Magazine.
- Wood, H. B. (1965). *The Development Education in Nepal: Study in Comparative Education*. Department of Health, Education, and Welfare National Institute of Education